

URGENSI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKAN PEMIMPIN BANGSA DI INDONESIA

Mukani¹

A. Pendahuluan

Peradaban suatu bangsa, secara teoritis, ditopang kekuatan pendidikan. Sejarah telah menorehkan tinta emasnya ketika Islam pada puncaknya mampu menguasai dua per tiga wilayah yang ada di bumi ini.² Pendidikan pada masa Dinasti Abbasiyyah lebih berfungsi sebagai *think tank* dari peradaban yang sedang dibangun. Di samping sebagai instrumen terpenting dalam membangun dan menjaga eksistensi sebuah peradaban, pendidikan juga merupakan aspek teologis yang harus dilaksanakan oleh semua orang Islam. Saat itu, pendidikan bermakna tidak sekedar transformasi ilmu pengetahuan, namun juga sebagai proses pembelajaran untuk hidup dengan memiliki karakter.

Kesadaran umat Islam bahwa integrasi intelektualitas dengan spiritualitas akan mampu menjawab kemunduran jaman yang diamali oleh dunia Barat, terbukti mampu membawa Islam ke puncak kejayaan. Itu semua terwujud melalui proses panjang yang dibiasakan oleh para pemimpin dan semua lapisan masyarakat. Namun, perhatian yang kurang dari pemimpin terhadap kemajuan pendidikan disinyalir menjadi faktor utama dari proses kemunduran yang mendera.³ Lambat laut, dinasti yang didirikan Abu Abbas al-Saffah ini sampai pada jurang kemerosotan. Kenyataan ini membuat dunia Islam mengalami masa keterpurukan. Puncak dari itu semua adalah masuknya bangsa-bangsa Barat ke wilayah-wilayah Islam dengan kapasitasnya sebagai penjajah yang hanya menambah kesengsaraan, kebodohan dan kemiskinan di kalangan umat Islam. Bahkan tiga kerajaan Islam besar Islam, yaitu Utsmani di Turki, Mughal di India dan Syafawi di Iran, jatuh ke tangan pihak Barat. Mesir, sebagai salah satu pusat Islam terpenting, jatuh ke tangan Napoleon Bonaparte dari Perancis di tahun 1798.⁴

¹Alumni Konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005).

²Wilayah kekuasaan Islam pada periode ini sampai ke Spanyol melalui Afrika Utara dan India melalui Persia (Iran). Daerah ini semua tunduk kepada kekuasaan *khalifah*. Baca Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 13. Khusus tentang deskripsi Islam di Spanyol, baca W. Montgomery Watt, *A History of Islamic Spain* (Edinburgh : Edinburgh University Press, 1992).

³Syafiq A. Mughni, *Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kegelapan* (Surabaya : LPAM, 2002), 54-57.

⁴Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, 13-14. Bandingkan dengan Nurcholis Majid, *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 63. Baca juga uraian Hamka tentang kebangkitan Barat karena kemajuan cara berpikirnya, sehingga mereka mampu melahirkan Abad Teknis, sedangkan umat

Dalam konteks bangsa, sekarang rakyat Indonesia seharusnya mengelus dada dengan kejadian yang terdapat di negeri ini. Setiap hari, media massa tidak henti-hentinya memuat berita tindak pidana korupsi, baik pelakunya berasal dari kalangan pejabat, politisi, akademisi, penegak hukum, swasta atau lainnya.

Kekerasan yang mengatasnamakan “kebenaran” sudah marak terjadi di banyak tempat, baik yang mengatasnamakan agama, suku atau kelompok kepentingan tertentu. Fakta ini berujung kepada pelanggaran hak asasi manusia hampir di semua sektor.

Dewasa ini banyak terjadi peristiwa kekerasan, kerusuhan, peperangan antar suku yang mengatasnamakan agama. Memang pada dasarnya ungkapan SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) selalu menghadirkan kondisi konotasi sebagai sesuatu yang sensitif, yang mudah meledak jika tersentuh.⁵ Sebenarnya istilah SARA itu netral dan riil, tidak ada kejanggalan, keanehan, ancaman dan menakutkan. Agama Islam, khususnya dalam setiap kajian keilmuan, senantiasa dihadapkan kepada kesulitan untuk memperoleh pemahaman yang utuh (*holistic*) dan terhindar dari pengertian bias. Demikian pula dihadapkan pada adanya kesenjangan (*distance*) antara pemahaman nilai-nilai Islam dengan realitas kehidupan umat Islam sehari-hari.⁶ Tidak adanya kesinambungan (*matching*) antara norma Islam yang sangat luhur dengan realitas umat yang tidak Islami.

Berbagai asumsi penyebabnya bermunculan, terutama karena pemahaman Islam yang telah terhenti dan terpaku kepada warisan-warisan lama yang sudah tidak aktual lagi dengan keadaan jaman atau juga karena pemahaman Islam hanya dilihat secara tekstual saja sehingga berakibat kepada sikap umat Islam yang antagonistik dan puritan. Menurut Hasyim Muzadi, konflik antarumat beragama setidaknya ada tiga faktor, yaitu pemahaman agama yang parsial, persoalan non-agama yang diagamakan dan ditanggung oleh unsur kepentingan politik dan ekonomi.⁷

Para ilmuwan muslim pada umumnya berpandangan bahwa agama adalah seperangkat doktrin, kepercayaan atau sekelompok norma dan ajaran Tuhan yang bersifat universal dan mutlak kebenarannya. Sedangkan keberagamaan adalah

Islam hanya berkisar kepada “romantisme sejarah” yang masih berada di Abad Agraria. Hamka, *Pelajaran Agama Islam* (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), xv.

⁵Imam Bawani, *Segi-Segi Pendidikan Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1987), 54.

⁶Tim MKPK Agama Islam Unesa, *Islam Rahmatan Li Al-Alamin* (Surabaya : Unesa University Press, 2002), xi.

⁷Hasyim Muzadi, “Menemukan Kembali Nilai Universal Agama” dalam Nazaruddin, *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialog Islam Kristen di Indonesia* (Malang : UIN Maliki, 2010), 176.

penyingkapan atau pemahaman para penganut ajaran Tuhan yang tentu saja kebenarannya menjadi bernilai relatif dan sudah pasti setiap penyingkapan terikat oleh sosial kultur.⁸ Dari sinilah muncul keragaman pandangan dan paham keagamaan.

Pendidikan, yang diharapkan menjadi tulang punggung dalam perubahan menuju Indonesia sebagai bangsa bermartabat ternyata juga masih jalan di tempat. Seolah masih terjebak kepada budaya formalistis yang menomorsatukan asas administratif-birokratis. Ide-ide cemerlang yang mampu mengangkat posisi Indonesia ke pentas dunia belum memperoleh apresiasi yang memadai. Semua kondisi ini menjadi keprihatinan amat mendalam bagi sebuah bangsa besar bernama Indonesia yang sudah sekian lama menghirup udara merdeka.

B. Sebuah Analisis : Krisis Keteladanan

Jika mau jujur, yang terjadi di Indonesia berawal dari ketiadaan keteladanan yang ditunjukkan para pemimpin di negeri ini. Masyarakat tidak memiliki figur yang patut menjadi teladan dalam kehidupan berbangsa. Tidak salah saat berbagai elemen bangsa saat ini terkotak-kotak, mengidolakan sosok yang ditokohkan dari kelompoknya sendiri.

Pada tataran ini, boleh dikatakan sah-sah saja. Namun saat sebuah kelompok mulai berani menyalahkan kelompok lain, bahkan memandang rendah derajat kelompok dan tokohnya, di sinilah muara permasalahan konflik horisontal. Klaim kebenaran atas *apa yang diyakini* dan *apa yang dilakukan* menjadi alat justifikasi bagi aksi-aksi sepihak yang merugikan pihak lain.

Saat berada pada posisi salah pun, mereka seolah tetap berada pada posisi benar. Meskipun itu masih bersifat sangat subyektif. Keinginan agar mundur dari masyarakat luas ditanggapi dengan *enteng* bahwa masih belum ada kekuatan hukum tetap yang mengharuskannya mundur dari jabatan publik tertentu. Ukuran etika seolah ditinggalkan begitu saja. Unsur politis dalam mempertahankan jabatan lebih mendominasi. Dalam konteks ini, dirasa “aneh” saat Andi Alfian Mallarangeng mengundurkan diri dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Keputusan ini diambil agar lebih fokus dalam menghadapi kasus hukum setelah

⁸Adeng Muchtar Ghazali, *Ilmu Studi Agama* (Bandung : Pustaka Setia, 2005), 20.

ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek Hambalang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁹

Pada posisi lain, bulan-bulan ini kita disibukkan media massa dengan sosok kandidat pemimpin (baca : presiden) yang akan bertanding pada pemilihan presiden 2014-2019 nanti. Berbagai nama memang sudah bermunculan. Namun, di balik itu semua, sebenarnya bangsa ini harus mulai memikirkan yang lebih jauh dari itu, yaitu mengatasi korupsi dan kekerasan antar kelompok, meskipun harus dibutuhkan kerja keras dari semua elemen bangsa.

Para ahli tidak perlu meninggalkan pola yang bijak dan arif untuk mengkritisi fakta ini. Untuk melihat dengan lebih jelas, harus semakin sadar bahwa kecenderungan kepemimpinan yang berlangsung saat ini, dari atas hingga bawah, diwarnai dengan watak kekuasaan yang cenderung korup. Terlebih tampaknya hal ini kemudian menjadi semacam budaya, karena dilakukan terus menerus, berulang-ulang dan tanpa rasa malu.

Untuk meraih posisi kekuasaan, seolah budaya *S3* sudah menjadi biasa, yaitu *sowan*, *sungkem* dan *sajen*. *Sowan* berarti calon penguasa harus sering menunjukkan loyalitas dan eksistensi diri di depan atasan. Itu semua dilakukan agar nama yang melekat memiliki kredit poin bagi promosi jabatan berikutnya. *Sungkem* memiliki konotasi seseorang yang hendak meraih jabatan harus menunjukkan kepatuhan dan keberpihakan kepada atasan, bukan kepada keadilan yang melepaskan unsur-unsur subyektif. Segala yang menjadi perintah atasan harus dilaksanakan dengan segera, meskipun itu harus menabrak kaidah hukum yang berlaku.

Sedangkan kata *sajen* lebih diartikan sebagai “setor upeti” kepada atasan. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa jabatan di negeri ini memiliki angka nominal tertentu untuk mendudukinya. Inilah yang kemudian menjadi penyebab utama dari semakin kokohnya mental korup. Penyakit korupsi telah melembaga dalam denyut birokrasi negeri ini. Terlihat, secara tradisional kebiasaan upeti untuk raja adalah benih-benih korupsi. Rasa "sungkan" mengungkap skandal korupsi, turut juga menyemaikan kebiasaan buruk itu.

Saat ini, rakyat sudah mulai frustrasi atas skandal korupsi para pemimpinnya. Yang dulu dipilih karena (dikira) dikenal memiliki *image* baik dan ideal bagi seorang pemimpin, tetapi justru setelah jadi penguasa, lambat laun berperilaku hidup yang kian

⁹Mukani, “Andi Alfian Mallarangeng Mundur, Ukuran Etika Baru,” *Jawa Pos*, 10 Desember 2012.

menonjolkan kesenjangan. Masyarakat yang melakukan anarkisme sosial dalam bentuk kerusuhan, penjarahan, tawuran, kericuhan dan penganiayaan atas sesamanya akan merasa tidak bersalah.

Hal ini disebabkan karena rasa putus asa dan tidak percaya lagi bahwa elit penguasa sungguh-sungguh hendak memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Pada gilirannya nanti bukan tidak mungkin sikap keteladanan yang salah kaprah ini akan mendorong rakyat untuk ikut-ikutan melakukan korupsi, merusak etika sosial dan tidak lagi percaya kepada elit penguasa.

Mengutip kata pendiri Ma'arif Institute, Buya Syafii Ma'arif, pemimpin tidaklah harus dari kalangan elite. "Orang biasa" namun memiliki kemampuan luar biasa juga patut dipertimbangkan. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan, kemungkinan jika "orang biasa" itu menjadi pemimpin, idealismenya akan dapat terus bertahan. Keteladanan luhur sosok pemimpin dalam bersikap dan berbuat sesuatu bagi sekelilingnya adalah syarat mutlak pemimpin.¹⁰

Vilfredo Pareto, dalam buku *Social Elites and Their Circulation*, menyatakan bahwa setiap masyarakat akan diperintah oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan dan politik secara mutlak. Kelompok tersebut mampu menduduki jabatan yang strategis dan tinggi dalam semua lapisan masyarakat. Mereka ini terdiri dari mekanik, advokat, preman sampai dengan para gundik. Kelompok inilah yang disebut dengan *elit*.

Pada teori elit dan sirkulasi elit itu, Pareto menawarkan konsep yang disebut dengan dua lapisan kelas sosial masyarakat. Yaitu lapisan atas yang terdiri dari kelompok elit yang sedang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*). Sedangkan lapisan kedua adalah kelas bawah yang terdiri dari lapisan kelompok masyarakat yang dipimpin (*non-elite*).

Dalam konteks keteladanan pemimpin, Kouzes dan Posner menyatakan ada lima praktik keteladanan. Yaitu mencontohkan cara (*model the way*), menginspirasi visi bersama (*inspire a shared vision*), menantang proses (*challenge the process*), memampukan orang lain untuk bertindak (*enable others to act*) dan menyemangati jiwa (*encourage the heart*).

¹⁰Tiko Septianto, "Capres Lotre" di Tengah Krisis Keteladanan", *Jawa Pos*, 23 Mei 2012.

Terkait *model the way*, Kouzes dan Posner berpandangan bahwa memimpin berarti bahwa harus mampu menjadi contoh yang baik dan mewujudkan yang telah dikatakan. Gelar yang dimiliki seseorang merupakan pemberian, akan tetapi kehormatan hanya dapat dicapai melalui tingkah laku seseorang. Kouzes dan Posner mengatakan bahwa perbuatan pemimpin jauh lebih penting dari perkataannya. Pemimpin harus menunjukkan contoh terlebih dahulu dalam tindakan sehari-hari dan mempertunjukkan komitmen yang mendalam atas segala hal yang diyakini.

Krisis keteladanan yang mendera Indonesia inilah yang dulu terbukti mengakibatkan multikrisis pada 1997 silam. Awalnya memang krisis ekonomi yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Kehebatan akibat dari krisis keteladanan ini mampu membuat sendi-sendi kehidupan bangsa ini seolah “mati suri” saat itu. Namun, sebagai sebuah investasi jangka panjang, pendidikan tetap diharapkan mampu mengakhiri krisis ini melalui penyediaan sumber daya yang bermutu.

C. Solusi : Pendidikan Karakter

Bangsa ini harus berbenah. Sebagai bagian elemen bangsa, rakyat Indonesia harus mampu melakukan hal terbaik bagi Indonesia yang lebih baik. Itu bisa diwujudkan ketika negara mampu memberikan dukungan riil bagi pelaksanaan pendidikan bermutu yang mempertahankan jati diri bangsa. Ini disebabkan rasa bangga dengan beridentitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar seolah mulai pudar, atau mungkin malah sudah hilang dalam benak generasi muda?

Salah satu hal positif yang menarik untuk didiskusikan di sini adalah pendidikan karakter. Sebuah isu utama pada beberapa tahun terakhir yang diusung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program besar ini dimulai dari adanya kesadaran peluang bagi Indonesia untuk berbicara lebih banyak di dunia internasional pada tahun-tahun mendatang. Di saat negara-negara sekarang yang sudah maju menghadapi jumlah penduduk mayoritas yang sudah tidak produktif lagi, sekitar empat puluh tahun lagi Indonesia akan dipenuhi dengan anak-anak muda yang kreatif dan inovatif (*gold generation*). Inilah yang disebut dengan *demographic devidence*.¹¹

¹¹Moh. Nuh, *Seminar Nasional Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama*, 17 Pebruari 2012 di kampus Unisda Lamongan.

Usaha yang sedang dilakukan ini akan menjadi tidak bermakna ketika *stakeholders* yang terdapat di dunia pendidikan Indonesia tidak ambil bagian dalam mewujudkan pendidikan bermutu atau, pada tataran tertentu, akan menjadi pihak tertuduh yang semakin memperkeruh buruknya wajah pendidikan Indonesia sekarang. Kejujuran diharapkan mampu menjadi intisari dari pendidikan karakter yang sedang digagas itu.¹²

Unsur terpenting dari pendidikan karakter adalah kejujuran. Bangsa Indonesia harus berani mengakui bahwa kejujuran adalah sesuatu yang kian hari kian langka di negeri ini. Ada yang terpaksa tidak jujur. Misalnya, guru yang “membantu” siswa saat mengerjakan Ujian Nasional. Jika guru tidak membantu siswa, maka angka kelulusan sekolahnya akan rendah. Akibatnya, sekolah akan ditutup.

Sekolah yang mutu gurunya tinggi, dan biasanya mahal, bisa melarang siswa menyontek dan menindak guru yang membiarkan penyontekan. Ada seorang kepala sekolah yang menyatakan bahwa siswa di sekolahnya dalam ulangan tidak ada guru yang mengawasi karena saat ada siswa yang menyontek, akan ada siswa lain yang melaporkannya.

Di sekolah tersebut ada kantin kejujuran yang juga tidak ada penjaganya. Semua siswa mengambil makanan atau minuman lalu membayar dan mengambil sendiri uang kembaliannya. Ulangan tanpa diawasi dan kantin kejujuran seperti itu akan sangat bermanfaat dalam menanamkan kejujuran dalam diri siswa.

Bangsa ini perlu mendorong dua latihan kejujuran itu dilakukan oleh sekolah, tetapi tidak boleh latah. Di Jawa Timur lebih dari 200 sekolah mencoba melakukannya dalam waktu singkat. Dikhawatirkan hal itu dipaksakan sehingga menjadi massal tanpa melihat kelayakan dari program yang baik itu. Para *decision makers* harus berhati-hati dalam bertindak supaya masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap program yang baik itu.¹³

Sebagai unsur terpenting dalam pendidikan karakter, kejujuran menjadi “panglima perang” dalam berproses. Karena tanpa kejujuran, karakter unggul yang lain menjadi kurang berarti. Kejujuran adalah dasar bagi seluruh kehidupan. Hal itu merupakan prasyarat utama bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, yang

¹²Salahuddin Wahid, “Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren,” *Majalah Aula*, No. 8 Tahun XXXIII, Agustus 2011, 70-77.

¹³Salahuddin Wahid, *Berguru Pada Realitas* (Malang : UIN Maliki Press, 2011), 117.

berlandaskan prinsip saling percaya, kasih sayang dan tolong menolong. Tanpa rasa saling percaya, tidak mungkin bagi bangsa ini untuk menggerakkan perekonomian dan perdagangan secara produktif dan tidak mungkin mewujudkan masyarakat yang aman dan sejahtera. Prasangka adalah ciri menonjol dari masyarakat yang tidak memegang teguh kejujuran.

Pembiasaan kejujuran harus dimulai sejak kecil di rumah. Mulai dari hal-hal kecil juga. Pasti para orang tua selalu memberikan nasehat kepada putra-putri tentang kejujuran, tetapi mungkin kurang efektif karena nadanya seperti orang berceramah. Masyarakat sudah waktunya menggali pelajaran dari kisah keluarga Indonesia yang telah berhasil membiasakan kejujuran tidak dengan petuah, tetapi melalui peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan keluarga.

Sebagian besar rakyat Indonesia masih jujur. Kampanye politik dalam skala besar dan terus menerus tentang pentingnya kejujuran dan keberhasilan dalam perjuangan menanamkan kejujuran perlu terus dilakukan. Sejumlah kecil sekolah berhasil dalam mengelola kantin kejujuran, kantin tanpa penjaga yang dimaksudkan untuk menanamkan nilai kejujuran.

Beberapa pihak pernah mengadakan kompetisi kejujuran di antara siswa. Dicari siswa paling jujur menurut penilaian kawan-kawan satu kelas, lalu satu sekolah, satu desa dan seterusnya. Jika bangsa ini menganggap bahwa kejujuran itu kurang penting untuk diperjuangkan, berarti tinggal menunggu kehancuran bangsa Indonesia, cepat atau lambat.

Fakta ini diperparah dengan kondisi riil dunia pendidikan Indonesia selama ini masih menekankan kepada aspek kognitif. Itupun mutunya masih di bawah harapan. Dibanding sekian puluh tahun lalu mutu pendidikan secara umum tidak baik dan tidak merata. Dibanding negara tetangga, Indonesia masih jauh tertinggal. Menurut Mochtar Buchori, yang menggali dari gagasan Ki Hajar Dewantara, pendidikan watak seharusnya membawa siswa kepada pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Istilah pedagogiknya, dari *gnosis* sampai ke *praksis*.

Untuk sampai kepada praksis, tampaknya pendidikan Indonesia belum sampai kepada pendidikan watak. Selama ini pendidikan watak diformulasikan menjadi pendidikan agama, tetapi dalam implementasinya pendidikan agama juga ditekankan

kepada aspek kognitif. Pendidikan agama yang seharusnya menjadi pendidikan karakter ternyata juga tidak berhasil. Ini dikarenakan pendekatannya hanya otak kiri, dalam bentuk pengetahuan yang harus dihapal, dan tidak menyentuh otak kanan, seperti merasakan, menghayati dan mengubah perilaku.

Pendidikan di negeri ini ternyata gagal dalam menghasilkan warga negara yang bermoral atau berkarakter. Proses pendidikan nasional menganut asas *subject-matter oriented*, yaitu upaya-upaya untuk memberikan peserta didik begitu banyak informasi kognitif dan motorik yang terkadang justru kurang relevan dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan psikologis mereka. Sudah saatnya mengubah asas itu menjadi *student oriented*, yang lebih menekankan kepada pertumbuhan, perkembangan dan kebutuhan peserta didik secara utuh, baik lahir maupun batin.

Bangsa ini perlu menegaskan lagi bahwa prioritas utama dan pertama bagi pembangunan Indonesia ialah pendidikan. Kedua ialah pendidikan dan ketiga adalah pendidikan. Efisiensi anggaran pendidikan yang sudah ditingkatkan menjadi 20% dari APBN harus dilakukan dalam bentuk menghentikan tindak korupsi di lembaga yang mengelola pendidikan. Keefektifan anggaran harus dilakukan dalam bentuk merumuskan program yang sesuai dengan tuntutan keadaan, realitas dan fokus.¹⁴ Mutu guru harus terus ditingkatkan dalam menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada diri siswa. Manajemen pendidikan harus dirombak secara efektif, tidak panjang dan berbelit seperti selama ini.

D. Pembahasan : Pembiasaan Keteladanan

Pendidikan karakter diharapkan mampu membawa generasi bangsa ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif dan akhirnya sampai pada pengamalan secara nyata, baik dalam konteks keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Pembiasaan nilai-nilai luhur ini diharapkan mampu menopang hidup kebangsaan.

Untuk sampai ke arah itu, perlu dilakukan proses batin yang harus terjadi dalam diri, yaitu munculnya keinginan yang amat kuat untuk mengamalkan nilai. Peristiwa ini disebut *conatio* dan langkah untuk membimbing dalam membulatkan tekad tadi

¹⁴Ibid, 128-129.

bernama *konatif*. Oleh Ki Hajar Dewantara, proses itu diterjemahkan dengan kata cipta, rasa dan karsa.

Menurut Doni Koesoema, jika ingin pendidikan karakter berjalan efektif dan utuh, harus menyertakan tiga basis dalam pemrogramannya. *Pertama*, desain pendidikan karakter berbasis kelas. *Kedua*, pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. *Ketiga*, desain pendidikan karakter berbasis komunitas. Pendidikan karakter hanya akan bisa efektif jika tiga desain pendidikan karakter di atas dilaksanakan secara bersamaan dan sinergis. Tanpanya, pendidikan di Indonesia hanya akan bersifat parsial, inkonsistensi dan tidak efektif.

Rusworth Kidder menjelaskan tujuh kualitas yang diperlukan untuk keberhasilan pembiasaan karakter, disebut *seven E's*. Ketujuh kualitas itu adalah :

1. Empowered (pemberdayaan)

Guru-guru harus diberdayakan untuk melakukan pembiasaan karakter. Opini publik menunjukkan dukungan yang luas bagi pembiasaan karakter di sekolah dan kepala sekolah harus meyakinkan para guru bahwa mereka sanggup melakukannya.

2. Effective

Dimungkinkan untuk mengajarkan karakter secara efektif. Kidder menyatakan bahwa guru memiliki segala bukti bahwa ketika guru melakukan intervensi dalam proses pembiasaan karakter, siswa menjadi mengerti tentang banyak hal yang sebelumnya tidak mereka pahami. Proses pendidikan yang diberikan benar-benar meningkatkan kemampuan penalaran moral mereka.

3. Extended into the Community

Komunitas harus menolong sekolah untuk memahami nilai-nilai yang penting dan mendukung programnya. Jangan mencoba menyusun program pembiasaan karakter tanpa melibatkan komunitas lebih dulu, karena saat kita mulai menjalankan program, akan ada suara nilai-nilai siapa yang diajarkan?

4. Embedded (melekat)

Jangan memberikan pembiasaan karakter secara terpisah. Jangan menciptakan semacam *ghetto* etik yang menempatkan pembiasaan karakter pada suatu sudut kurikulum dan proses pembelajaran. Guru tidak punya kemewahan waktu untuk mengajar mata pelajaran etik tersendiri, tetapi mereka bisa memberikan pesan etik pada setiap mata pelajaran.

5. Engaged (terlibat)

Buatlah komunitas terlibat dengan menyodorkan topik-topik yang mereka anggap sangat penting. Publik pada saat ini amat peduli pada soal-soal seperti *sortmanship* dan *sportifity*, penipuan dan teknologi. Saat guru mengajarkan keterampilan komputer kepada siswa, pertama-tama bicarakanlah segi-segi etik dalam menggunakan komputer dan seterusnya.

6. Epistemological

Kembangkan kerangka konseptual, suatu cara untuk membicarakan soal etika. Berbuat lebih banyak daripada mengumpulkan para siswa berbincang soal ide-ide moral, meskipun terdapat koherensi antara cara berpikir tentang makna etik dengan upaya menolong siswa untuk mampu menerapkannya secara baik.

7. Evaluative

Buatlah beberapa struktur, seperti *pre-test* dan *post-test*, yang memungkinkan guru memetakan kemajuan siswa. Kidder menawarkan “skala lima poin” yang bermula dari (1) kesadaran etik (2) kepercayaan diri untuk berpikir tentang dan membuat keputusan etik (3) kapasitas untuk menggunakan kepercayaan diri itu secara praktis dalam kehidupan seseorang (4) kapasitas untuk menggunakan pengalaman itu dalam komunitas (5) kapasitas untuk menjadi agen perubahan dalam merealisasikan gagasan-gagasan etik ini dan menciptakan dunia yang berbeda.

Setelah melalui pembahasan mendalam, guru mampu menampilkan lima nilai yang akan ditanamkan ke dalam diri peserta didik yaitu ikhlas, jujur, tanggungjawab, kerja keras dan toleran. Tentu masih banyak nilai-nilai lain yang positif dan perlu ditanamkan ke dalam diri anak bangsa, seperti sikap adil, rasa malu, percaya diri, komitmen disiplin, keberanian, harga diri, motivasi, berpikir positif, rendah hati, kesederhanaan, hemat, teliti dan sebagainya. Nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan atau digabungkan ke dalam lima nilai di atas.

Pembiasaan karakter harus dimulai dalam lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik bagi putra-putrinya. Ini dilakukan karena disadari bahwa waktu yang ada bagi mereka lebih banyak dihabiskan di keluarga, bukan di sekolah.

Pembiasaan karakter merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak monopoli tugas sekolah. Mulai dari keluarga sampai level pemimpin di republik ini. Para pejabat

pemerintahan pusat dan daerah bertanggung jawab untuk menciptakan keteladanan moral yang positif, karena masyarakat sangat terpengaruh oleh perilaku pejabat. Jika pejabat korup, maka masyarakat sangat mudah untuk meniru dan menjadikannya sebagai legitimasi. Jika pejabat melanggar aturan, akan membuat masyarakat mencontoh pelanggaran tersebut. Semua pejabat pemerintahan harus memiliki standar moral yang membuat mampu dijadikan teladan bagi seluruh warga masyarakat.

Secara tradisional, pemimpin di Jepang memilih *harakiri* atau bunuh diri jika terlanjur melakukan tindak kesalahan. Hal ini adalah contoh tanggung jawab keteladanan yang sangat besar dalam diri para pemimpin. Tentu saja tidak untuk ditiru di Indonesia dalam hal bunuh dirinya, namun diteladani dalam perasaan tanggung jawabnya. Hal ini bisa dikuatkan melalui kode etik pejabat pemerintahan dan ditindaklanjuti dengan penegakan disiplin kerja melalui *reward and punishment* yang ketat. Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran moral juga diperlukan dalam upaya menegakkan keteladanan.¹⁵

Selama persoalan keteladanan ini tidak menjadi prioritas, maka selama itu juga pembiasaan karakter tidak akan berhasil. Maka kuncinya adalah keteladanan dari masing-masing pihak yang berperan penting dalam bangsa ini. Sebagaimana dikatakan John Dewey bahwa pendidikan moral (karakter) itu terbentuk dari proses pendidikan dalam kehidupan dan kegiatan yang dilakukan oleh siswa secara terus menerus. Selain itu John Dewey berpendapat bahwa karakter hanya dapat diajarkan dengan cara membiasakan melalui perbuatan praktis.

E. Penutup

Nilai-nilai karakter sudah saatnya harus mulai ditanamkan mulai sejak dari lingkungan keluarga peserta didik. Sebab, karakter tidak diciptakan tanpa adanya proses keteladanan dan pembiasaan. Itu dapat dimulai dari kalangan terdekat seperti orang tua, guru dan pemimpin bangsa. Ketika para pemberi teladan memberikan contoh buruk, persepsi dan tingkah laku buruk yang tercipta. Tatkala ini sudah menjadi kebiasaan, maka kehancuran suatu bangsa tinggal menghitung hari.

Pada posisi ini, benar suatu kaidah hukum bahwa perbuatan baik yang dibiasakan secara rutin, meski sedikit, akan lebih bermanfaat nilainya dibanding

¹⁵Cahyadi Takariwan, "Merindukan Keteladanan Para Pemimpin," *Kompas*, 16 Januari 2012.

perbuatan baik yang banyak tetapi hanya sesekali dilakukan, karena berbuat baik itu sebenarnya menjadi ajaran semua agama, terlebih hakikat setiap manusia sebenarnya adalah pemimpin.*

BIBLIOGRAPHY

- Bawani, Imam. *Segi-Segi Pendidikan Islam*. Surabaya : Al-Ikhlas, 1987.
- Ghazali, Adeng Muchtar. *Ilmu Studi Agama*. Bandung : Pustaka Setia, 2005.
- Hamka. *Pelajaran Agama Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Majid, Nurcholis. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- Mughni, Syafiq A. *Dinamika Intelektual Islam Pada Abad Kegelapan*. Surabaya : LPAM, 2002.
- Mukani. "Andi Alfian Mallarangeng Mundur, Ukuran Etika Baru," *Jawa Pos*, 10 Desember 2012.
- Muzadi, Hasyim. "Menemukan Kembali Nilai Universal Agama" dalam Nazaruddin. *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialog Islam Kristen di Indonesia*. Malang : UIN Maliki, 2010.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1992.
- Nuh, Moh. *Seminar Nasional Kongres I Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama*, 17 Pebruari 2012, Unisda Lamongan.
- Septianto, Tiko. "Capres Lotre" di Tengah Krisis Keteladanan", *Jawa Pos*, 23 Mei 2012.
- Takariwan, Cahyadi. "Merindukan Keteladanan Para Pemimpin," *Kompas*, 16 Januari 2012.
- Tim MKPK Agama Islam Unesa. *Islam Rahmatan Li Al-Alamin*. Surabaya : Unesa University Press, 2002.
- Wahid, Salahuddin. "Pendidikan Karakter Berbasis Pesantren," *Majalah Aula*, No. 8 Tahun XXXIII, Agustus 2011.
- Wahid, Salahuddin. *Berguru Pada Realitas*. Malang : UIN Maliki Press, 2011.
- Watt, W. Montgomery. *A History of Islamic Spain*. Edinburgh : Edinburgh University Press, 1992.

